

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895365 Fax. (0351) 892528

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 karena adanya berbagai penyesuaian dengan RPJMD, perubahan kewenangan daerah, perubahan organisasi perangkat daerah, penyesuaian target-target makro dan mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dengan telah disusunnya RPJMD Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 maka Dinas Kesehatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan harus menyusun Rencana Strategis Perubahannya. Atas rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah selesai disusun dan ditetapkan.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini menggambarkan tujuan jangka panjang 5 (lima) tahunan yang ingin dicapai dan menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapainya melalui penerapan strategi dan kebijakan kesehatan yang diambil. Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di Dinas Kesehatan dan UPTDnya, sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan upaya kesehatan serta dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2023.

Magetan, April 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN

dr. HARI WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 200212 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi , dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat daerah	40
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	67
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU	68
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	68
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	73
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	78
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	85
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	86
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	90
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	90
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.	103
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	160
BAB VIII PENUTUP	167

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Komposisi tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	40
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Berdasarkan jurusan pendidikan	41
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan Golongan	42
Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	43
Tabel 2. 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	43
Tabel 2. 8 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	44
Tabel 2. 29 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017	60
Tabel 2. 30 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017	61
Tabel 2. 31 Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017	62
Tabel 2. 32 Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan Tahun 2013-2017	63
Tabel 2. 33 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi	64
Tabel 3. 1 Perumusan Penjelasan Misi.....	76
Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	80
Tabel 3. 3 Penyusunan Penjelasan Visi.....	81
Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	83
Tabel 4. 1 Tujuan Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD.....	92
Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan	94
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	162
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utaman Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.....	162
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	162

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, ayat (2) “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan di daerah maka Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagai perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 didasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, teknokratis, Top Down Planning dan Bottom up Planning serta politik. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang diakibatkan karena adanya berbagai penyesuaian diantaranya :

1. Penyesuaian dengan RPJMN
2. Perubahan kewenangan daerah
3. Perubahan organisasi perangkat daerah
4. Penyesuaian target-target makro
5. Penyesuaian dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya

Dengan telah diterbitkannya dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ... Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan melaksanakan kewenangan wajib di bidang kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan kesehatan, berperan sebagai penanggung jawab, penggerak, pembina dan pelaksana pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan daerah dan kesehatan yang berlaku. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan proses perencanaan sebagai formulasi komprehensif (menyeluruh) demi mencapai tujuan.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat Program-Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Magetan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Perubahan ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama

sebagai bentuk penjabaran visi, misi Bupati terpilih dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perubahan ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kesehatan dan selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini dilakukan dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan merupakan satu kesatuan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan. Dengan demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah di bidang kesehatan melalui pelaksanaan Program-Program Kesehatan di Kabupaten Magetan.

Perencanaan strategis Dinas Kesehatan merupakan suatu proses identifikasi tujuan jangka panjang dan menentukan arah Dinas Kesehatan serta antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik internal maupun eksternal. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan bertujuan merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan agar selaras dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magetan.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 menyajikan Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator Kinerja, Rencana Program dan Kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam jangka waktu tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan juga dapat dijadikan bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif

dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Magetan, khususnya di bidang kesehatan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila

Substansi dari Pancasila mempunyai kebenaran yang universal dari Bangsa Indonesia dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Kelima sila Pancasila : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan landasan idiil yang kuat bagi pembangunan di bidang kesehatan.

2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya :

a. Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28 H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

c. Pasal 28 C

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan ketentuan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari alam pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

d. Pasal 28 B

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- e. Pasal 34 ayat 2
Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - f. Pasal 34 ayat 3
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3. Landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, antara lain :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - n. Peraturan Presiden Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- t. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- u. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- v. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- w. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/V/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- y. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2012 Nomor 15);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 - dd. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 - ee. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 - ff. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 - gg. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 - hh. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan UPTD-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama lima (5) tahun ke depan pada Dinas Kesehatan dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati Bupati Magetan periode masa jabatan tahun

2018–2023 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi serta kebijakan lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Kesehatan
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD-nya selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;
5. Memberikan arah terhadap kebijakan Dinas Kesehatan, strategi pembangunan kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan, lintas Organisasi Perangkat Daerah disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.
6. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian penjelasan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Berisi uraian penjelasan umum mengenai gambaran tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Berisi uraian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berisi uraian strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi indikator dan target kinerja urusan wajib kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- BAB VIII PENUTUP**
Penutup memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangun

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi , dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, sebagaimana berikut ini :

1. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Seksi Surveillans dan Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - 3) Seksi SDM Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
2. RSUD dr. Sayidiman
3. Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
4. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat;
 - b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;

- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
 - h. mengurus kesejahteraan pegawai;
 - i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
 - b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
 - c. melaksanakan tata usaha keuangan;
 - d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 - f. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
 - g. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun laporan keuangan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
 - b. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - c. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- f. menghimpun data dan menyusun laporan monev hasil renja, penyerapan anggaran (TEPRA), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- h. mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- i. menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP); dan
- j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional serta koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di

- bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - e. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
- 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia,

- perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- masyarakat;
- g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah raga;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- g. menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

- okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas sektor tentang program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan

- haji; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vector dan zoonotik;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik, termasuk pemantauan dan evaluasi

penyakit menular di Unit Transfusi Darah (UTD);
dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan

- pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
- g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-

- lintas, dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
 - e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, dan penanggulangan bencana bidang kesehatan;
 - f. penyusunan kebijakan dan regulasi bidang pelayanan kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta

- prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik serta mutu dan akreditasi;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes dan klinik pratama serta mutu dan akreditasi;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer dan klinik pratama; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit, termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan

- rujukan serta pemantauan rumah sakit termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan, dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan serta pemantauan rumah sakit termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk klinik utama, laboratorium kesehatan, optik, rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat Kabupaten;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan program pelayanan kesehatan tradisional termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

- i. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi penerbitan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- f. penyusunan kebijakan dan regulasi bidang sumber daya kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi

- obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;

- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan obat buffer Kabupaten, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana, dan obat yang bersifat insidental;
 - j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan izin produksi makanan minuman pada industri rumah tangga;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola distribusi dan

- pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola distribusi dan pemeliharaan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - i. melaksanakan pengawasan terhadap distribusi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - k. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin toko alat kesehatan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai

tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengendalian perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber

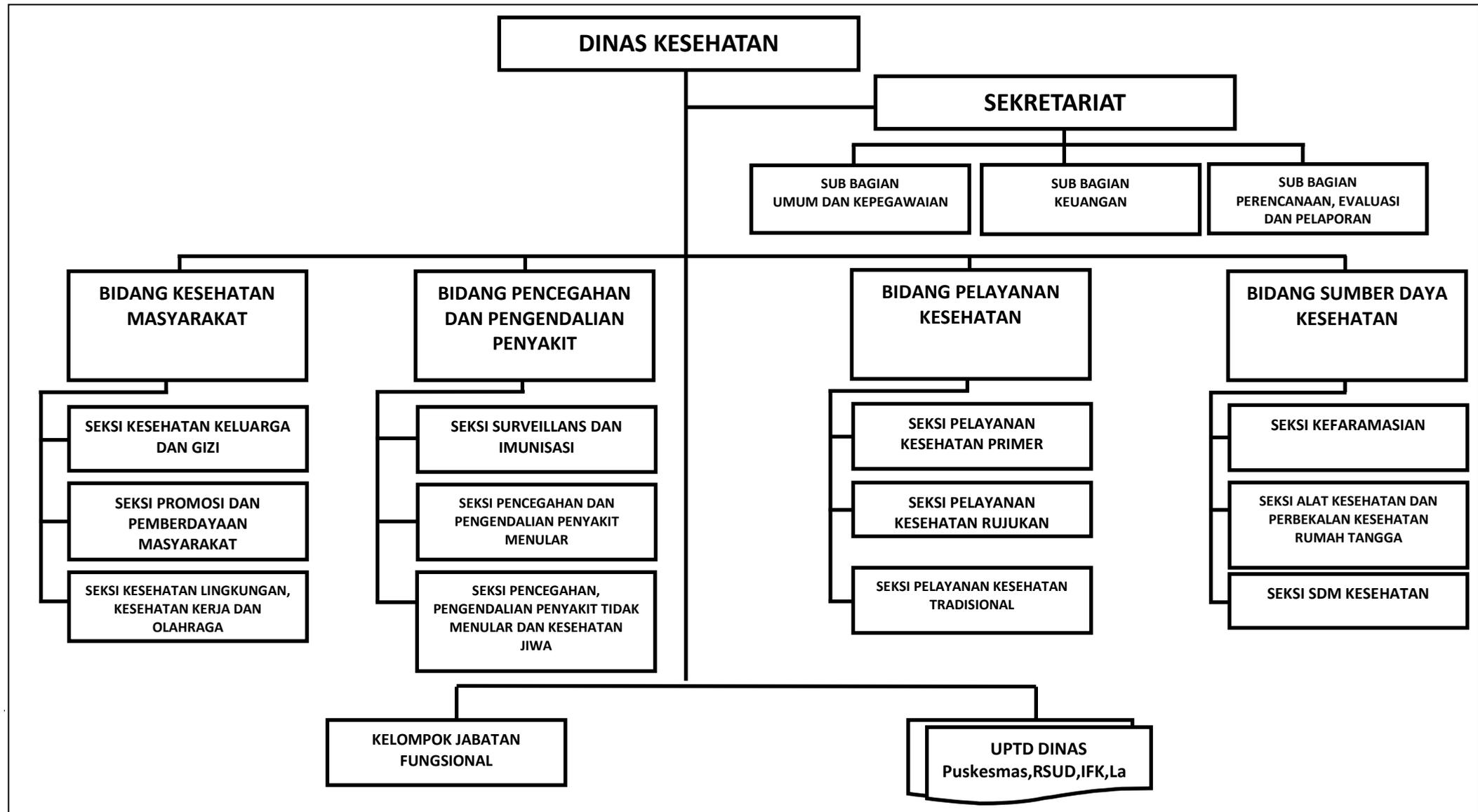
- daya manusia kesehatan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan peta sumberdaya manusia kesehatan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - k. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin praktik perorangan tenaga kesehatan;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan praktik perorangan;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

f. UPTD

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan sebagai tenaga fungsional dengan tugas sesuai dengan keahlian dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Komposisi tenaga di lingkup Dinas Kesehatan

Jumlah tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2017 adalah sebanyak 1.423 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Komposisi tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

No.	Instansi	Tenaga Teknis	Tenaga Administrasi Pendukung
1	Dinas Kesehatan	10	73
2	Puskesmas dan GFLK	581	146
3	RSUD dr. Sayidiman	511	293
	Jumlah	1.102	512

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman

2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
	PNS :									
1.	Non Fungsional	0	11	166	0	0	0	27	4	208
2.	Fungsional	0	0	31	27	0	426	117	1	602
	JUMLAH	0	11	197	27	0	426	144	5	810

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Berdasarkan jurusan pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana/S2	Manajemen Kesehatan	3
2.	Pasca Sarjana/S2	Kesehatan Masyarakat	1
3.	Pasca Sarjana/S2	Farmasi	1
4.	Sarjana/S1	Kedokteran Umum	37
5.	Sarjana/S1	Kedokteran Gigi	20
6.	Sarjana/S1	Kesehatan Masyarakat	22
7.	Sarjana/S1	Keperawatan	14
8.	Sarjana/S1	Farmasi	6
9.	Sarjana/S1	Teknik Lingkungan	9
10.	Sarjana/S1	Sosial	2
11.	Sarjana/S1	Ekonomi Manajemen	3
12.	Sarjana/S1	Ekonomi Akuntansi	2
13.	Sarjana/S1	Administrasi Negara	2
14.	Sarjana/S1	Psikologi	-
15.	Sarjana/S1	Hukum	3
16.	Sarjana/S1	Pendidikan	-
17.	Ahli Madya/D3	Keperawatan	172
18.	Ahli Madya/D3	Kebidanan	287
19.	Ahli Madya/D3	Gizi	18
20.	Ahli Madya/D3	Farmasi	9
21.	Ahli Madya/D3	Analisis Medis	15
22.	Ahli Madya/D3	Kesehatan Lingkungan	15
23.	D4	Kebidanan	31
24.	Ahli Madya/D3	Perawat Gigi	8
25.	D1	Kebidanan	19
26.	D1	Pendidikan Ahli Gizi (SPAG)	2
27.	D1	Pendidikan Penilik Hygiene (SPPH)	9
28.	Setaraf SLTA	Perawat Kesehatan	34
29.	Setaraf SLTA	Pekarya Kesehatan	37

No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah
30.	Setaraf SLTA	Sekolah Menengah Farmasi (SMF)	13
31.	Setaraf SLTA	Sekolah Menengah Analis Kesehatan	4
32.	Setaraf SLTA	SPRG	16
33.	SLTA	-	63
34.	SMEA	-	12
35.	STM	-	4
36.	SLTP	-	11
J U M L A H			810

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV				Jumlah
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
	PNS :																	
1.	Non Fungsional	0	0	0	0	13	0	17	17	21	81	30	16	5	2	1	-	203
2.	Fungsional	0	0	0	0	13	2	83	150	67	81	81	107	17	1	5	-	607
JUMLAH																		810

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

4. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2. 5
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Berdasarkan *Jabatan/Eselon*

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	4
4.	Kasubag	IV.a	1
5.	Kasi	IV.a	12
6.	Kasubag TU UPTD	IV.b	23
7.	Jabatan Fungsional	-	761
8.	Staf/Pelaksana	-	103
	Jumlah		905

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	RSUD dr. Sayidiman	1
2.	Puskesmas	22
3.	Puskesmas Pembantu	59
4.	Ponkesdes	107
5.	Posyandu Balita	920
6.	Posyandu Lansia	240

Sumber : Profil Dinas Kesehatan

Penyediaan sarana pelayanan kesehatan melalui RSUD dr. Sayidiman, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Posyandu Balita dan Posyandu Lansia diharapkan dapat menjangkau masyarakat termasuk masyarakat di pedesaan agar mendapat pelayanan kesehatan dengan mudah dan bermutu.

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang berada di setiap Kecamatan. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Magetan berjumlah 22 unit yang terdiri dari 17 Puskesmas perawatan (6 Puskesmas Poned) dan 5 Puskesmas non perawatan yang tersebar di 18 Kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap penduduk sebesar 3,54 per 100.000 penduduk dilayani oleh 3-4 Puskesmas atau 1 Puskesmas melayani 28.240 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas di Kabupaten Magetan sudah memenuhi target nasional (1 Puskesmas rata-rata melayani 30.000 penduduk).

Keberadaan 59 Puskesmas Pembantu di Kabupaten Magetan semakin mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga telah dilaksanakan upaya untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya di masyarakat dengan adanya 107 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), 920 Posyandu Balita dan 240 Posyandu Lansia diharapkan agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 7
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Kendaraan Operasional Roda Dua	145
2.	Kendaraan Operasional Roda Empat	45
3.	Meubelair	33.857
4.	Komputer unit/jaringan	8
5.	Personal Komputer	248

Sumber : Pengurus Barang Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkantor di Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan menggunakan fasilitas 11 ruangan. Sarana dan prasarana sebagai alat pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sudah cukup

memadai namun masih diperlukan pemeliharaan agar sarana dan prasarana kerja tersebut supaya dapat bekerja secara optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2018-2023.

2.3.2 Sumber Dana

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2014-2018 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2014-2018 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh Bappeda setiap tahun sebesar 60 Milyar sampai 184 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mulai tahun 2014-2018 disajikan pada tabel di bawah. Data untuk realisasi tahun 2018 belum tersedia, sehingga kondisinya tidak bisa dibandingkan .

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa rasio antara total realisasi dengan total anggaran dari tahun 2014 s.d. 2017 terus mengalami peningkatan dan rasio terbaik adalah pada tahun 2016 sebesar 85%.

Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Periode 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	SPM									
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%			-	-	97,05%	95 %	97,05%	95 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%			-	-	98,52%	100%	98,52%	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%			-	-	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	100%			-	-	98,06%	100%	98,06%	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%			-	-	97,16%	87 %	97,16%	87 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%			-	-	84,06%	73 %	84,06%	73 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	-	-	-	-	93,10%	75 %	93,10%	75 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	-	-	-	-	52,94%	56 %	52,94%	56 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	-	-	-	-	97,39%	100 %	97,39%	100 %
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	-	-	-	-	95,13%	100 %	95,13%	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	80%	-	-	-	-	100%	100 %	100%	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	-	-	-	-	100%	96 %	100%	96 %
B.	INDIKATOR PRIORITAS DINKES									
1.	Prevalensi Balita Stunting	-			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	-			<102%	<102%	92,24%	100%	100%	100%
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	-			100%	<21%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Cakupan Pelayanan Lanjut Usia	-			100%	100%	93,1%	75%	93,1%	75%
5.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-			100%	100%	60,5%	87%	60,5%	87%
6.	Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar	-			95%	95%	97,6%	96,38%	97,6%	96,38%
7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	-			100%	100%	96,69%	94,87%	96,69%	94,87%
8.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	-			100%	100%	98,52%	100,25%	98,52%	100,25%
9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	-			100%	100%	81,39%	103,58%	81,39%	103,58%
10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	-			100%	100%	98,08%	106,31%	98,08%	106,31%
11.	Cakupan KB Aktif	-			80%	80%	78,54%	78,69%	78,54%	78,69%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	Cakupan ASI Eksklusif	-			64,40%	64,40%	70,00%	77,80%	70,00%	77,80%
13.	Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT	-			90,20%	90,20%	91,30%	82,60%	91,30%	82,60%
14.	Cakupan TTD Remaja Putri	-			84,00%	84,00%	70,00%	40,00%	70,00%	40,00%

ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Diketahui bahwa Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar pada tahun 2020 masih di bawah target nasional (100%) dengan capaian kinerja 95%, mengalami penurunan sebesar 2,05 % dari capaian tahun 2019.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan persalinan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan adalah persalinan ibu yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan persalinan pada tahun 2020 sudah memenuhi target nasional (100%) dengan capaian kinerja 100%, mengalami kenaikan sebesar 1,48 % dari capaian tahun 2019.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2020 sudah mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja 100%.

4. Pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita pada tahun 2020 sudah mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja 100 %, sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,94 % dari capaian tahun 2019.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah penjangkauan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran

Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 masih di bawah target nasional (100%), turun 10,06 % dari capaian tahun 2019.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif pada tahun 2020 masih di bawah target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 73 %, mengalami penurunan sebesar 11,06 % dibanding tahun 2019.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut pada tahun 2020 masih di bawah standar nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 75% mengalami penurunan sebesar 18,10 % dari capaian tahun 2019.

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pada tahun 2020 masih di bawah standar nasional (100%), akan tetapi mengalami kenaikan sebesar 3,06 % dari tahun 2019 dengan capaian kinerja sebesar 56 %.

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar

kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Kabupaten Magetan. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Persentase penyandang Diabetes Mellitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus pada tahun 2020 sudah memenuhi standar nasional (100%), dengan capaian kinerja sebesar 100 %, naik sebesar 2,61 % dari capaian kinerja tahun 2019.

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, pelayanan tersebut meliputi pelayanan promotif preventif untuk meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi: Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pada tahun 2020 sudah memenuhi standar nasional (100%), dengan capaian kinerja sebesar 100 %, naik sebesar 4,87 % dari capaian kinerja tahun 2019..

11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang

berlaku antara lain : Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB pada tahun 2020 sudah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 100%.

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Persentase Pelayanan Kesehatan orang Berisiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai standar pada tahun 2020 belum memenuhi target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 96 %, mengalami penurunan sebesar 21,52 % dari capaian kinerja tahun 2019.

13. Angka Kematian Ibu

Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magetan (73,40/100.000 Kelahiran Hidup) berhasil diturunkan bila dibanding Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 (110,58/100.000 KH) bisa diturunkan sebesar 37,18% capaian tersebut sudah mencapai target nasional sebesar 102/100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian sebesar 73,40 %.

Angka Kematian Ibu adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas.

Masih adanya kematian ibu di Kabupaten Magetan disebabkan oleh penyebab langsung perdarahan 50%, Pre-eklampsia dan Eklampsia sebesar 16,6%. Selanjutnya karena penyebab tidak langsung TBC sebesar 16,6% dan jantung 16,6%. Meskipun Angka Kematian Ibu dapat diturunkan namun akibat pandemi Covid 19 terjadi permasalahan baik ditingkat fasilitas pelayanan dasar dan rujukan.

Permasalahan ditingkat dasar kurangnya pemantauan ibu hamil akibat pembatasan layanan (physical distancing), terbatasnya APD saat awal pandemi serta beralihnya peran petugas dalam penanganan covid-19. Selain itu permasalahan di tingkat rujukan disebabkan kapasitas ruang isolasi untuk maternal terbatas dan belum tersedianya ruang operasi khusus covid yang mengakibatkan jika harus dilakukan tindakan operasi Caesar di ruang operasi biasa maka akan mengganggu pelaksanaan operasi yang lainnya.

Adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Magetan maka jumlah ibu hamil yang terpapar juga semakin banyak, sedangkan skrining hanya menggunakan rapid yang sensitifitasnya rendah sehingga pemerintah Kabupaten Magetan memutuskan bagi ibu hamil diwajibkan untuk melaksanakan tes swab menjelang persalinan.

Tujuan pemeriksaan Swab RT PCR merupakan tatalaksana pada ibu hamil yang akan melakukan persalinan yang harus dilakukan untuk mengetahui hasilnya positif ataupun negatif maka diwajibkan ibu hamil tersebut harus berdiam diri dirumah sampai dengan proses persalinan tiba untuk mengurangi risiko terpapar covid-19, selain terbatasnya ruang isolasi di RS rujukan Covid juga menjadi kendala sehingga ibu bersalin terlambat mendapatkan pertolongan persalinan, meskipun demikian pada tahun 2020 tidak terdapat kematian ibu yang disebabkan Covid-19 di Kabupaten Magetan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu selama tahun 2020 adalah :

- a. Pendampingan ibu hamil oleh kader Mayangsari
- b. Pelaksanaan kelas ibu hamil dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA

- c. Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan KIA
- d. Pembinaan Puskesmas PONEK oleh Tim PONEK
- e. Workshop Sosialisasi Tatalaksana Ibu Hamil dan Balita dengan Covid-19
- f. Audit Maternal dan Perinatal
- g. Workshop Peningkatan Kapasitas petugas dalam kegawatdaruratan Maternal dan Perinatal
- h. Komunikasi dan Koordinasi rujukan dengan jejaring antara Puskesmas/Klinik,RSU/RSIA tipe C,RSU Tipe B se-Karesidenan Madiun melalui WAG Jabaned Magetan.
- i. Pertemuan koordinasi rujukan ibu bersalin di masa Pandemi Covid-19 dengan penerbitan SE Bupati No.414/2805/403.109/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rujukan Ibu Hamil/Bersalin di masa pandemi Corona Virus Disease di Kabupaten Magetan.

14. Angka Kematian Bayi

AKB adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magetan (8,93/1000 Kelahiran Hidup) berhasil diturunkan bila dibanding Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 (9,71/1000 KH) bisa diturunkan sebesar 0,78% dengan capaian sebesar 100%.

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magetan tahun 2020 sudah mencapai target, bilamana dibandingkan tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,78% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Angka kematian neonatal per 1.000 KH adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal
2. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus kematian bayi dengan narasumber Dokter Spesialis Obgyn (DSOG) dan Dokter Spesialis Anak (DSA) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
3. Pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko tinggi.
4. Pelaksanaan kelas ibu balita dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA.
5. Untuk menurunkan kasus BBLR dan kelainan bawaan pada bayi, dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, demi mempersiapkan reproduksi yang berkualitas bagi calon ibu diantaranya : Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja dan Edukasi untuk calon pengantin dengan menggunakan buku buku Catin.
6. Pembinaan pelayanan maternal dan neonatal bagi faskes primer.
7. Terbentuknya jejaring antara Puskesmas/Klinik-RSU/RSIA Tipe C-RSU Tipe B se-Karesidenan Madiun untuk mempermudah komunikasi rujukan maternal dan neonatal melalui WAG Jabaned Magetan.
8. Penguatan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan) dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan berfungsinya Tim Penakib (Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi).
9. Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas.

15. Prevalensi Balita Stunting

Berdasarkan hasil pengukuran Bulan Timbang tahun 2020 prevalensi balita stunting di Kabupaten Magetan sebesar 10,29 % capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,51% bila dibanding capaian tahun 2019 sehingga capaian tahun 2020 sudah memenuhi target. Adanya penurunan Balita Stunting di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketrampilan kader dalam mempergunakan alat anthropometri dan melakukan pengukuran sesuai standar, serta semakin banyaknya posyandu yang memiliki alat anthropometri sesuai standart yang bisa dipenuhi dari dana desa.

Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Prevalensi stunting di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 sebesar 10.29 %, capaian 2020 mengalami penurunan sebesar 0.51 % bila dibanding capaian tahun 2019, capaian tersebut sudah memenuhi target tahun 2020. Selama tahun 2020 telah dilakukan upaya secara optimal untuk mengatasi stunting di Kabupaten Magetan. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 antara lain :

- a. Pemberian Makanan Tambahan balita kurang gizi dan Bumil KEK
- b. Pemberian Vitamin A kepada Balita dan Ibu Nifas
- c. Pemberian Tablet Fe untuk ibu hamil dan remaja putri

- d. Orientasi pemberian makanan bayi dan anak
- e. Orientasi motivator ASI
- f. Bimbingan teknis kepada petugas kesehatan
- g. Pertemuan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting
- h. Orientasi pelaksanaan Posyandu Balita
- i. Orientasi Surveilans Gizi

Selain indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sesuai T-C.23, untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan, Dinas Kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain :

1. Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan.

Tabel 2. 8
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,96	72,14	72,01	72,09	72,16

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan 2017 Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka usia harapan hidup di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka usia harapan hidup di Kabupaten Magetan sebesar 71,87 tahun menjadi sebesar 71,91 tahun pada tahun 2014. Angka ini terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 menjadi 72,16 tahun. Selama rentang tahun 2013 hingga tahun 2017, angka usia harapan hidup Kabupaten Magetan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup di Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dari usia harapan hidup nasional.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan petunjuk penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/kota, balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.

Tabel 2. 9
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satua	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Kasus	156	184	218	277	332
2.	Jumlah Balita Ditimbang	Anak	32.4 16	36.1 55	36.7 81	36.5 15	34.4 54
3.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,48	0,51	0,59	0,76	0,96

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan 2017 Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Magetan tahun 2013-2017 karena pembagiannya bukan jumlah seluruh balita yang ada, namun jumlah balita yang ditimbang. Berdasarkan data tersebut, Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magetan secara umum mengalami tren yang meningkat yaitu mulai dari 0,46% (2013) menjadi 0,96% (2017). Secara absolut, jumlah kasus gizi buruk balita sebanyak 332 kasus di tahun 2017. Meningkatnya persentase gizi buruk pada balita disebabkan karena penerapan surveilans aktif yang mengakibatkan penemuan lebih dini penderita gizi buruk.

Kejadian gizi buruk dapat disebabkan oleh berbagai hal beberapa di antaranya asupan balita yang tidak adekuat dibandingkan kebutuhannya. Secara tidak langsung pola konsumsi balita dipengaruhi oleh pola asuh orang tua terutama ibu, yang dipengaruhi oleh pengetahuan ibu mengenai makanan dan pola asuh. Upaya yang sudah dilakukan di Kabupaten Magetan adalah intensifikasi penyuluhan dan konseling gizi di Posyandu kepada ibu balita tentang pemberian asupan makanan yang memenuhi gizi seimbang dengan

baik dan benar bagi balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap balita kurang gizi, ibu hamil KEK dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), serta perawatan terhadap semua balita gizi buruk yang ditemukan.

3. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang atau *underweight* adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) berada pada rentang Z-Score antara -2 SD dan -3 SD. Salah satu agenda SDGs adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita menjadi 17% di tahun 2019, yang merupakan agenda RPJMN 2014-2019, yang sebelumnya sebesar 19,6% di tahun 2013 secara nasional, dan tujuannya adalah menghilangkan gizi kurang di tahun 2030.

Tabel 2. 10
Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banyaknya balita gizi kurang	Anak	1.571	1.609	1.660	1.509	1.666
2.	Jumlah balita	Anak	45.021	43.929	41.967	41.188	40.454
3.	Persentase balita gizi kurang	persen	3,49	3,66	3,96	3,66	4,12

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan 2017 Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan persentase balita gizi kurang di Kabupaten Magetan tahun 2013-2017. Secara umum, tren persentase balita gizi kurang adalah meningkat dari 3,49% di tahun 2013 menjadi 4,12% di tahun 2017, meskipun sempat terjadi penurunan tahun 2016 yaitu menjadi 3,66%.

Upaya yang sudah dilakukan di Kabupaten Magetan adalah intensifikasi penyuluhan dan konseling gizi di Posyandu kepada ibu balita tentang pemberian asupan makanan yang memenuhi gizi seimbang dengan baik dan benar bagi balita dan peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai makanan bayi dan anak serta pola asuh.

4. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan ini menitik beratkan pada peserta jaminan kesehatan yang masuk kategori 40% penduduk terbawah atau berpenghasilan terendah, sehingga pemberian jamian kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan ini bisa tepat sasaran.

Tabel 2. 11
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Peserta BPJS	orang	-	-	44.298	36.982	44.298
2.	Jumlah 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah	orang	-	-	76.919*	75.929*	71.807*
3.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	-	-	57,59*	48,70*	61,69*

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan 2017

Keterangan : *) Data diolah Bappeda Litbang Kab. Magetan Tahun 2013 dan 2014 data tidak tersedia

Berdasarkan data diatas pada tahun 2015 proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan di Kabupaten Magetan adalah 57,59% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 61,69% belum mencapai target nasional 68,57%.

5. Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi/ Hipertensi (SDGs)

Hipertensi adalah salah satu penyakit yang sering disebut dengan “pembunuh diam-diam” karena penyakit ini tidak menyebabkan gejala jangka panjang. Namun, penyakit ini mungkin mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa layaknya penyakit jantung. Jika tidak terdeteksi dini dan terobati tepat waktu, hipertensi dapat mengakibatkan komplikasi

serius penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, diabetes, dan banyak penyakit berbahaya lainnya.

Berdasarkan data prevalensi penyakit tekanan darah tinggi di Kabupaten Magetan tahun 2017 tercatat ada 69,24% masih sangat tinggi jika target nasional adalah menurun menjadi 24,3%.

Tabel 2. 12
Prevalensi Tekanan Darah Tinggi/ Hipertensi

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi/ Hipertensi	%	-	-	-	-	69,24

Sumber Data : SIPD Kabupaten Magetan 2017

Keterangan : Tahun 2013-2016 data tidak tersedia

Tabel TC-24
Analisis Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2019 – 2020

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Belanja Daerah								
	Belanja Langsung	233.102.673.061	226.235.636.446	195.796.941.068	179.482.051.511	84,00%	79,33%	-2,95%	-8,33%
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.713.029.000	14.434.218.900	7.956.226.721	7.677.547.178	81,91%	53,19%	48,61%	-3,50%
2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6.311.265.000	2.488.887.460	5.572.223.625	1.570.928.802	88,29%	63,12%	-60,56%	-71,81%
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	7.216.105.000	5.367.711.000	5.782.371.911	4.119.936.778	80,13%	76,75%	-25,61%	-28,75%
4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	35.538.998.116	15.155.279.050	22.576.913.301	12.316.377.403	63,53%	81,27%	-57,36%	-45,45%
5	Program Upaya Kesehatan Perorangan	103.145.999.000	101.158.320.993	104.686.053.994	87.924.344.055	101,49%	86,92%	-1,93%	-16,01%
6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	0	3.217.350.000	0	1.916.009.182	#DIV/0!	59,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	9.266.713.617	4.051.041.188	2.255.381.717	1.531.195.400	24,34%	37,80%	-56,28%	-32,11%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Belanja Daerah								
8	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	48.918.999.228	47.387.914.152	38.745.966.805	36.428.400.519	79,20%	76,87%	-3,13%	-5,98%
9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	10.971.564.100	14.656.772.703	6.461.848.221	10.314.512.655	58,90%	70,37%	33,59%	59,62%
10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	0	17.000.000.000	0	14.585.733.173	#DIV/0!	85,80%	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.080.000.000	927.470.000	982.852.343	770.182.065	91,00%	83,04%	-14,12%	-21,64%
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	530.000.000	272.000.000	500.212.300	214.708.300	94,38%	78,94%	-48,68%	-57,08%
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	175.000.000	0	90.030.000	0	51,45%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
14	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	235.000.000	118.671.000	186.860.130	112.176.000	79,51%	94,53%	-49,50%	-39,97%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa peluang dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan khususnya berkaitan dengan penyusunan sebagai berikut :

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pembangunan kesehatan di daerah dengan disediakannya anggaran kesehatan termasuk bagi masyarakat miskin
2. Tersedianya fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dan mempunyai tenaga yang profesional di bidangnya
3. Komitmen Pemkab dalam pembangunan kesehatan dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan program kesehatan melalui SK Tim.
4. Dukungan peran serta masyarakat (lintas sektor, lintas program, organisasi masyarakat, swasta, stakeholder)

Sedangkan beberapa tantangan dapat menghambat dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kabupaten Magetan merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan bencana
2. Belum optimalnya pemanfaatan Posyandu oleh masyarakat
3. Pola penularan penyakit yang dipengaruhi gaya hidup dan arus informasi
4. Penutupan Lokalisasi
5. Kebijakan pelaksanaan Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
6. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan peningkatan kualitas RSUD

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis perkembangan masalah pembangunan kesehatan dan peran Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Magetan serta dengan memperhatikan sumber daya kesehatan, evaluasi kinerja, perkembangan dan tantangan yang sedang dihadapi, maka permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan adalah:

1. Masih Adanya Kasus Kematian (ibu, bayi dan balita)

Secara umum permasalahan kesehatan ibu dan anak bila dilihat sudah baik karena sudah berada jauh di bawah batas ambang yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi ada beberapa hal perlu perhatian khusus karena kesehatan ibu, bayi dan balita merupakan urusan penting yang termasuk strategis nasional dan global yang akan berdampak besar pada kualitas manusia di masa depan. Selain itu, masih adanya kasus kematian bayi meski sudah di bawah batas, serta peningkatan Angka Kematian Neonatal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Penyebab kematian bayi terbanyak di Kabupaten Magetan selama tahun 2017 adalah BBLR (55,22%), asfiksia (26,87) dan kelainan kongenital (11,94%), sepsis (1,49%) dan lain-lain (4,48). Angka Kematian Ibu (AKI) sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan target provinsi dan Indonesia, namun tren yang fluktuatif menyebabkan AKI tidak bisa diprediksi dari tahun ke tahun, terkadang turun, namun kemudian melonjak drastis. Penyebab kematian ibu terbanyak di Kabupaten Magetan selama tahun 2017 adalah

kelainan cerebral (34%), infeksi (23%), dan lainnya (perdarahan, preeklamsi, dan lain-lain)

2. Belum optimalnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magetan secara kuantitas sudah mencukupi berdasarkan indikator rasio per penduduk dan cakupan per kecamatan. Namun, secara kualitas, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses Puskesmas, optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman secara berkelanjutan dengan Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit. Hingga tahun 2018, seluruh puskesmas (22) dan RSUD dr. Sayidiman sudah terakreditasi. Akreditasi dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) terutama peningkatan mutu dan kinerja, antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk fasilitas kesehatan swasta dan praktek mandiri didorong untuk berproses akreditasi.

3. Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan

Untuk memberikan pemerataan hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, salah satu program pemerintah adalah jaminan kesehatan nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKM) dengan total *coverage* bahwa seluruh penduduk Kabupaten Magetan harus memiliki asuransi/penjaminan kesehatan baik dengan BPJS Mandiri, BPJS ASN, PBI Nasional maupun PBI Daerah. Pemerintah terus berupaya agar dapat mencapai *Universal Health Coverage*. Agar *Universal Health Coverage* dapat terwujud perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program penjaminan kesehatan, sehingga masyarakat dihimbau untuk ikut serta dalam program JKN

4. Belum terpenuhinya jumlah serta pemerataan tenaga kesehatan

Masih ada kesenjangan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2017

sebesar 33,09 dari target 30 per 100.000 penduduk, rasio perawat 105,31 (target 100,2), rasio bidan 71,27 (target 100,2), rasio tenaga gizi 5,57 (target 12,59), rasio tenaga farmasi 10,99 (target 12,59), rasio tenaga kesehatan masyarakat 1,59 (target 12,59), dan rasio tenaga sanitarian 6,37 (target 12,59). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa beberapa tenaga kesehatan secara kuantitas sudah memenuhi standar tetapi pemerataan di fasilitas kesehatan belum memenuhi standar. Sebagai contoh adalah rasio dokter, secara kuantitas sudah memenuhi standar karena jumlah dokter di sini termasuk dokter yang hanya praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan swasta, sementara jumlah dokter di Puskesmas (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa standarnya 1(satu) Puskesmas 2 (dua) dokter untuk Puskesmas Rawat Jalan dan 3 (tiga) dokter untuk Puskesmas Rawat Inap) juga belum terpenuhi. Selain bergerak dalam bidang pengobatan atau kuratif, Puskesmas sejatinya merupakan pusat pembangunan wilayah berbasis kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat yang berbasis promotif dan preventif, sehingga untuk meningkatkan fungsi tersebut perlu dioptimalkan rasio tenaga kesehatan yang berkaitan dengan hal itu seperti tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, serta tenaga gizi. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, tenaga kesehatan tersebut rasionya masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

5. Belum optimalnya pelayanan imunisasi

Cakupan desa UCI di Kabupaten Magetan tahun 2017 adalah 94,89%. Persentase ini jika dibandingkan dengan target nasional yang 100% dan Jawa Timur yang >95%, cakupan desa UCI di Kabupaten Magetan masih belum mencapai target. Cakupan imunisasi dasar lengkap belum 100%, namun dapat dibandingkan dengan target 88% memang sudah 100% capaian kinerjanya. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Di Kabupaten Magetan masih ada sebagian masyarakat yang

tidak setuju dan menolak imunisasi karena kepercayaan tertentu. Pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat dengan cara yang tepat agar konsep imunisasi dapat diterima dengan baik, sehingga tidak hanya memberikan manfaat kepada anak mereka sendiri tapi juga kepada masyarakat di sekitarnya karena dapat menekan risiko berkembangnya penyakit. Dengan tercapainya desa UCI 100%, diharapkan mampu menekan munculnya penyakit pada bayi atau balita yang berdampak pada kecacatan atau kematian yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi.

6. Masih berkembangnya penyakit menular seperti TB Paru, HIV/AIDS, DBD

Kasus penyakit menular di Kabupaten Magetan masih berkembang. Secara persentase, penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Magetan tidak tinggi (<1%). Namun bila melihat kecenderungannya, kasus HIV-AIDS meningkat. Pada tahun 2017 ada 110 kasus HIV AIDS, jumlahnya meningkat 53 kasus dari tahun 2016. Prevalensi tuberkulosis tahun 2017 adalah 85 per 100.000 penduduk, meningkat terus dalam dua tahun terakhir. Selain itu juga masih banyak kasus TBC BTA (+) yang ditemukan setiap tahunnya. Cakupan penemuan kasus Tuberkolusis (TBC) sebesar 45,66%, penemuan kasus pneumonia balita sebesar 51,50%. Begitu juga dengan kasus DBD yang cenderung meningkat namun semua yang ditemukan telah ditangani sesuai standar. Penyakit menular seperti TB Paru, HIV/AIDS, DBD, merupakan penyakit yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat.

7. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative

Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan bertambahnya umur dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat tanpa dibarengi dengan meningkatnya pengetahuan hidup sehat, mengakibatkan

pola konsumsi yang salah yaitu cenderung berubah ke arah makanan cepat saji. Tingginya konsumsi makanan yang tinggi kandungan lemak jenuh, rendah serat dan vitamin serta kurangnya aktivitas fisik berisiko meningkatnya kasus penyakit degeneratif. Pelayanan kesehatan untuk pencegahan penyakit degeneratif saat ini juga belum optimal, seperti cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2017 adalah sebesar 75,31% (target 100%), pelayanan kesehatan pada usia lanjut 66,61 (target 100%), pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi 69,24 (target 100%), dan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus 41,02 (target 100%). Semua indikator ini merupakan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah untuk pemenuhannya dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit tidak menular.

8. Penurunan stunting dan kasus gizi buruk

Kasus gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat kasus gizi buruk selama tahun 2017 sejumlah 332 anak. Prevalensi balita gizi buruk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun prevalensinya masih di bawah angka Provinsi Jawa Timur dan nasional. Upaya penurunan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui pencegahan dan intervensi gizi dilakukan dengan upaya melalui melalui UKS, pemberantasan kecacingan, Tablet Tambah Darah (TTT) remaja putri, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan bagi calon pengantin, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan pemberian Vitamin A pada balita. Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans gizi dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta perbaikan sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan menggalakkan bahan pangan lokal.

Permasalahan di bidang kesehatan dapat diatasi atau diminimalisir dengan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik di

Puskesmas maupun RSUD; meningkatkan sistem informasi, manajemen, regulasi, dan administrasi kesehatan; serta dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan dana kesehatan terutama bagi tenaga kesehatan dan jaminan biaya kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018–2023 sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

Visi :

“Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera”

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam mewujudkan masyarakat Magetan yang SMART dengan kepanjangan Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman Now (sekarang). Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/pendidikan memadai (*educated*) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga

mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap pembaharuan dan kemajuan teknologi serta selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (keimanan), peribadatan, tata hubungan keluarga dan sosial masyarakat, serta akhlak dan perilaku budi pekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terprovokasi yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampil merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola dan mengolah kesempatan/peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin **Mantab** merupakan kepanjangan dari **Mandiri, Lestari dan Bermartabat** yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025. Periode pembangunan tahun 2018–2023 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005–2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pamantapan.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan/andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang SMART.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus-ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Misi :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Adapun masing-masing misi tersebut di atas memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Perumusan Penjelasan Misi

Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Kabupaten Magetan yang SMART	1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Magetan yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas. Misi ini memiliki arah dalam rangka menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Magetan yang sehat, berkarakter (berakhlak mulia, agamis, dan berbudaya), cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki spirit untuk maju dan berdaya saing.
Kabupaten Magetan yang MANTAB	2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan berbasis kekuatan lokal, peningkatan sarana dan prasarana perekonomian, serta peningkatan akses masyarakat dalam berusaha sehingga kemampuan ekonomi masyarakat lebih berkembang dan semakin kuat. Disamping itu, misi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa sebagai pemegang peranan penting dalam pembangunan daerah.
	3. Mengoptimalkan pengelolaan dan	Misi ini merupakan arah upaya untuk meningkatkan dan memantapkan sumberdaya

Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
	pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	alam, kualitas lingkungan, dan ketangguhan wilayah. Sumberdaya alam berkaitan dengan pemanfaatan serta pengelolaan agar tetap lestari dan mampu memenuhi kebutuhan. Lingkungan hidup agar kualitasnya tidak menurun dan berkelanjutan untuk masa depan. Ketangguhan wilayah agar siap menghadapi bencana dan tidak mengalami kerugian maupun kerusakan yang besar.
	4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat	Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memantapkan sarana prasarana dan fasilitas yang menunjang kegiatan masyarakat, seperti sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, ekonomi, permukiman, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah berkembangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Magetan.
	5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil	Misi ini memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju <i>good governance</i> .

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018–2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ikut membantu mensukseskan ***misi yang pertama*** yaitu

Misi 1 : “Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)“.

dengan program prioritas terkait bidang kesehatan yaitu :

Pemantapan kemudahan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat luas

Tujuan M1.T1 RPJMD Tahun 2018-2023

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran S 1.1 T1 RPJMD Tahun 2018-2023 :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator sasaran : Indeks Kesehatan

Strategi 1 :

Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas

Kebijakan:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi

Strategi 2 :

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

Kebijakan:

Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ikut membantu mendukung pencapaian sasaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 dari sasaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

Sasaran S 1.3 T1 :

Meningkatnya kesejahteraan Ekonomi masyarakat

Indikator Sasaran : Angka Kemiskinan

Strategi :

Memberdayakan masyarakat miskin, Keluarga Sejahtera dan PMKS lainnya

Arah Kebijakan urusan bidang kesehatan :

Menyelenggarakan Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015-2019 yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah :

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementrian/Lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian Kesehatan
12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi

Tabel 3. 2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kab Magetan
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pengendalian Penyakit Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan Meningkatnya sinergitas antar Kementrian/Lembaga Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar	1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan 2. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu	1. Belum sinkronnya menu pogram pusat dengan prioritas daerah 2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan 3. Penerbitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu 4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e	1. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.	negeri Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi		planning, e budgeting, e renggar	
9.	Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan		5. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal belum mengakomodir pengembangan pelayanan kesehatan di Kab. Magetan	
10.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
11.	Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian Kesehatan			
12.	Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi			

3.3.2 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan 2014-2019 dilaksanakan melalui analisis dan telaahan pada bab-bab sebelumnya. Visi Dinas Kesehatan merujuk pada visi Gubernur dalam RPJMD 2014-2019 dan Visi dalam Renstra Kementerian Kesehatan.

Rumusan Visi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagai berikut :

“Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”

Visi tersebut dijelaskan melalui beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

**Tabel 3. 3
Penyusunan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat	Masyarakat Jawa Timur lebih mandiri	Masyarakat Jawa Timur memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya dalam menjaga kesehatannya secara mandiri

	Hidup Sehat	Hidup dengan kondisi fisik, sosial, mental, emosional, spiritual dan kultural yang sehat dan dapat beraktivitas sebagai manusia produktif
	Pendukung : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Sistem informasi kesehatan yang kuat, regulasi yang memadai, pengelolaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan akuntabel

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan kemampuan yang optimal bisa memelihara kesehatan secara mandiri dalam rangka mencapai hidup yang sehat yang paripurna mulai dari fisik, mental, emosional, spiritual dan kultural. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur :

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat
2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
4. Mendayagunakan sumberdaya kesehatan
5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

Tabel 3. 4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kab Magetan
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat 2. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat 3. Meningkatnya upaya penanggulangan masalah gizi yang optimal 4. Meningkatnya upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana 5. Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat 6. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat dan aman 7. Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 2. Belum optimalnya penanganan masalah gizi masyarakat 3. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana 4. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 5. Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan 	<p>INTERNAL :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM : <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi - Jumlah tenaga medis yang kurang 2. Sarana dan prasarana belum semuanya sesuai standar 3. Pembiayaan operasional 4. Obat dan perbekalan kesehatan <p>EKSTERNAL :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektor belum optimal 2. Kabupaten Magetan rawan bencana alam 3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 4. Belum sinkron dan terpadunya indikator proram lintas sektor 	<p>INTERNAL :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub No. 4 Tahun 2010 tentang Ponkesdes 2. Pergub No. 63 Tahun 2011 tentang PAUD holistik integratif 3. Keputusan Bupati Nomor 188/ 159/Kept./ 403.013/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Magetan <p>EKSTERNAL :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Anggaran Desa dan Anggaran Dana Desa 2. Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan handal 8. Meningkatnya pembiayaan kesehatan	farmasi, perbekalan dan alat kesehatan 6. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan 7. Masih belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan dan kualitas SDM Kesehatan 8. Masih rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat 9. Belum optimalnya peran serta masyarakat terkait pelaksanaan PHBS kesehatan		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 dalam sistem perkotaan untuk rencana fungsi pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar telah menjangkau sampai setingkat ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Kab. Magetan yang melayani seluruh masyarakat magetan dengan adanya minimal 1 (satu) Puskesmas di setiap kecamatan. Pelayanan kesehatan rujukan tersedia di ibu kota kabupaten dengan adanya RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dalam KLHS RPJMD Magetan terdapat tujuh kategori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tiga tujuan diantaranya yang menjadi prioritas bidang kesehatan yang sudah terintegrasi dalam Renstra Dinas Kesehatan antara lain:

- a. Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dengan Pemberian iuran kepesertaan jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBId) untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

b. Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Peningkatan kegiatan perbaikan gizi masyarakat dengan penguatan promotif dan preventif program gizi dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin, ibu hamil dan kelompok rawan gizi lainnya.

c. Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka menurunkan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas, optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman secara berkelanjutan dengan Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Jaminan Kesehatan Nasional dengan total coverage bahwa seluruh penduduk Magetan harus memiliki asuransi/penjaminan kesehatan baik dengan BPJS Mandiri, BPJS ASN, PBI Nasional maupun PBI Daerah, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk penjaminan kesehatan.
4. Penurunan stunting dan kasus gizi buruk;
Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat kasus Gizi Buruk selama tahun 2018 sejumlah 412 anak ditemukan dan ditangani dengan 308 anak sudah sembuh dari status gizi buruk. Upaya penurunan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui PMT Pemulihan bagi balita kurus dan Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kalori), pemberian TTD pada remaja putri, pemberian Vitamin A pada balita, pemantauan pertumbuhan di Posyandu, pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pendampingan balita kurang gizi.
Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans gizi dan pemenuhan dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta perbaikan sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan menggalakkan bahan pangan lokal.

5. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir masih fluktuatif mengalami penurunan namun pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun 2015 sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2017 AKI menurun sebesar 97,57/100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2018 AKI mengalami kenaikan sebesar 158,07/100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan walaupun sudah mencapai target yaitu pada tahun 2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2015 sebesar 10,53/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2016 sebesar 10,89/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2017 menurun sebesar 10,37/1000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2018 menurun sebesar 10,09/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus perdarahan, pre eklamsi dan lain-lain sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi pada BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital.

6. Masih berkembangnya penyakit menular seperti TB Paru, HIV/AIDS, DBD;

Penyakit menular seperti TB Paru, HIV/AIDS, DBD, merupakan penyakit yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat

7. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative;

Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pola konsumsi gizi

masyarakat yang cenderung berubah ke arah makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.

8. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans PD3I (Penyakit Dapat Dicegah dengan Imunisasi) dengan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, analisa Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk mengidentifikasi daerah kantong, melakukan sweeping, peningkatan Surveilans Aktif Puskesmas, RS dan Fasyankes Swasta dalam deteksi dini PD3I serta sistem pencatatan dan pelaporan harus mengakomodir semua unit layanan yang ada termasuk swasta dan dilakukam kontrol yang baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD, sehingga tujuan Perangkat Daerah adalah sasaran RPJMD yang disesuaikan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan, Dinas Kesehatan melaksanakan misi yang kesatu tujuan kesatu yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Adapun sasarannya adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan. Adapun targetnya adalah 0,80 pada tahun 2023. Untuk mencapai sasaran tersebut pada RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Strategi “Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas” melalui kebijakan “Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan dan Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi”. Selain itu pada RPJMD Tahun 2018-2023 juga ditetapkan Strategi “Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas” melalui kebijakan “Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit”.

Dinas Kesehatan juga ikut mendukung pencapaian Sasaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “Meningkatnya kesejahteraan Ekonomi masyarakat”. Strategi bidang kesehatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah “Memberdayakan masyarakat miskin, Keluarga Sejahtera dan PMKS lainnya” dengan arah kebijakan untuk urusan bidang kesehatan “Menyelenggarakan Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga”. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan pemerintahan
Misi M1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)				
Tujuan T1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Sasaran S1.1 T1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan	Urusan Wajib Kesehatan (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Manusia	Indikator : Indeks Kesehatan		Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi	Urusan Wajib Kesehatan (Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit	Urusan Wajib Kesehatan - Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Program Upaya Kesehatan Perorangan - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan pemerintahan
				prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya - Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-Paru/ RS Mata - Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
	Sasaran S1.3. T1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Indikator : Angka Kemiskinan	Memberdayakan masyarakat miskin, Keluarga Sejahtera dan PMKS lainnya	Menyelenggarakan Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Urusan Wajib Kesehatan - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan)

Sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka tujuan Dinas Kesehatan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4.2. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya suatu tujuan yang diharapkan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4. 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2021	2023
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	72,18	72,20	72,22	72,24	72,26
		Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	0,21%	0,22%	0,225 %	0,23%	0,25%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2021	2023
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	77	77	77	77	77

BAB V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

<p>kesehatan</p> <p>5. RSUD dr. Sayidiman menjadi BLUD dan terakreditasi paripurna</p>		
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan 2. Perencanaan dan pemanfaatan anggaran di Puskesmas belum optimal 3. Belum optimalnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas 4. Beberapa jenis ketenagaan SDM Kesehatan belum terpenuhi jumlahnya di Puskesmas dan jaringannya 5. Puskesmas belum memenuhi standar sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 6. Masih adanya kasus gizi buruk 7. Capaian indikator Rumah Tangga Sehat masih rendah 8. Masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan

SASARAN	INDIKATOR	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Keluarga Sehat 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran 2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan 3. Optimalisasi koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 2. Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan upaya promotif, preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan anggaran (pemerintah pusat dan provinsi) 2. Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan upaya promotif, preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan anggaran (pemerintah pusat dan provinsi)
2. Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat

5.2 KEBIJAKAN

Strategi 1 : Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan upaya promotif, preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan anggaran (pemerintah pusat dan provinsi)	
Kebijakan Umum	Program Pembangunan
Peningkatan jaminan akses layanan kesehatan melalui pelaksanaan program-program kesehatan di fasilitas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Strategi 2 : Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	
Kebijakan Umum	Program Pembangunan
Peningkatan pelayanan kesehatan dengan optimalisasi kualitas sumber daya kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 4. Program Upaya Kesehatan Perorangan 5. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 6. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan jaminan akses layanan kesehatan melalui pelaksanaan program-program kesehatan di fasilitas kesehatan

2. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan optimalisasi kualitas sumber daya kesehatan sesuai standar.

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera				
MISI : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan pemerintahan
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Strategi : 1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan upaya promotif, preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan anggaran (pemerintah pusat dan provinsi) 2. Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	Arah Kebijakan : 1. Peningkatan jaminan akses layanan kesehatan melalui pelaksanaan program-program kesehatan di fasilitas kesehatan 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan optimalisasi kualitas sumber daya kesehatan sesuai standar	Urusan Wajib Kesehatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan disajikan pada matriks terlampir.

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1.1.1	Program Lama	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI);Angka Kematian Bayi (AKB);Prevalensi Balita Stunting;Cakupan Rumah Tangga Sehat;Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM per 100.000 kelahiran hidup ; per 1000 kelahiran hidup ; % ; % ; %	158,07 ; 10,07 ; 30,20 ; 62,00 ; 28,09	102,00 ; 23,00 ; 30,00 ; 62,00 ; 37,45	7.017.000.000	102,00 ; 21,00 ; 29,50 ; 63,00 ; 9,37	7.892.000.000									
		1.1.1.1		Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar;Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar;Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar;Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar;Cakupan KB Aktif % ; % ; % ; % ; %	96,00 ; 98,16 ; 100,00 ; 96,99 ; 79,00	100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 79,00	700.000.000	100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 79,00	700.000.000									
		1.1.1.2		Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Lanjut Usia ;Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar % ; %	88,53 ; 99,94	100,00 ; 100,00	400.000.000	100,00 ; 100,00	450.000.000									
		1.1.1.3		Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S);Cakupan ASI Eksklusif;Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT;Cakupan TTD Remaja	87,00 ; 63,90 ; 89,70 ; 79,00	88,00 ; 64,00 ; 89,80 ; 80,00	600.000.000	89,00 ; 64,10 ; 89,90 ; 81,00	800.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				Putri % ; % ; % ; %														
		1.1.1.4	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif;Cakupan Posyandu PURI;Cakupan UKBM yang dibina % ; % ; %	100,00 ; 74,00 ; 85,00	100,00 ; 74,00 ; 90,00	500.000.000	100,00 ; 74,00 ; 90,00	660.000.000									
		1.1.1.5	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK terbentuk;Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal;Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah;Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji;Persentase Kelompok/ Klub Olahraga Pos UKK ; Pos UKK ; % ; % ; %	35,00 ; 22,00 ; 30,00 ; 80,00 ; 35,00	22,00 ; 22,00 ; 30,00 ; 80,00 ; 35,00	500.000.000	5,00 ; 57,00 ; 30,00 ; 85,00 ; 35,00	500.000.000									
		1.1.1.6	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Cakupan PHBS;Cakupan Pendataan Keluarga Sehat;Cakupan Tatanan Sehat % ; % ; %	62,00 ; 100,00 ; 62,00	62,00 ; 100,00 ; 62,00	800.000.000	62,00 ; 100,00 ; 63,00	990.000.000									
		1.1.1.7	Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten;Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan desa/kel ; %	22,00 ; 80,00	80,00 ; 88,00	500.000.000	22,00 ; 88,00	500.000.000									
		1.1.1.8	Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	Persentase penduduk menggunakan jamban Sehat Permanen;Persentase Rumah Sehat;Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum	90,00 ; 75,00 ; 100,00 ; 86,00	90,00 ; 75,00 ; 100,00 ; 86,00	517.000.000	91,00 ; 75,00 ; 100,00 ; 86,00	517.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				berkualitas;Persentase TPM memenuhi syarat % ; % ; % ; %														
		1.1.1.9	Pengembangan Taman Posyandu	Pendampingan Taman Posyandu Taman Posyandu	526	526	0	526	0									
		1.1.1.10	Penyediaan IPAL	Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas unit	5	5	2.500.000.000	5	2.775.000.000									
		1.1.1.11	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.1.12	Jaminan Persalinan	Jumlah persalinan faskes primer dan sekunder yang belum punya penjaminan Ibu bersalin	300	300	0	300	0									
		1.1.1.13	Pengembangan Poskestren	Prosentase Poskestren ber PHBS %	0	29	0	30	0									
		1.1.2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar;Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar;Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar;Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar;Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar;Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar;Persentase Desa/Kelurahan UCI % ; %	77,79 ; 52,04 ; 73,23 ; 91,00 ; 44,00 ; 95,83 ; 90,00	100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 80,00 ; 100,00 ; 90,50	4.035.000.000	100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 80,00 ; 100,00 ; 91,00	4.167.500.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				; % ; % ; % ; % ; %														
		1.1.2.1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Angka Bebas Jentik;Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan;Penemuan kasus Pneumonia Balita;Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus;RFT Rate Kusta % ; % ; % ; % ; % ; %	95,00 ; 100,00 ; 85,00 ; 100,00 ; 100,00 ; 95,00	95,00 ; 100,00 ; 85,00 ; 100,00 ; 90,00 ; 95,00	1.840.000.000	95,00 ; 100,00 ; 85,00 ; 100,00 ; 90,00 ; 95,00	1.876.000.000									
		1.1.2.2	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan Orang	356	350	100.000.000	400	110.000.000									
		1.1.2.3	Peningkatan Imunisasi	Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap;Cakupan BIAS % ; %	92,00 ; 98,00	93,00 ; 96,00	300.000.000	93,50 ; 97,00	330.000.000									
		1.1.2.4	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Cakupan AFP per 100.000 penduduk	4,00 ; 100,00	3,00 ; 100,00	130.000.000	3,00 ; 100,00	150.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		1.1.2.5	Peningkatan Peran KPAD	Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS;Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan Kelompok WPA ; Kelompok Risti	3,00 ; 12,00	3,00 ; 12,00	50.000.000	3,00 ; 12,00	100.000.000										
		1.1.2.6	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan Bidang Kesehatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar %	100	100	45.000.000	100	0										
		1.1.2.7	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu;Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA);Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;Persentase kasus Pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar % ; % ; %	78,00 ; 25,00 ; 87,06 ; 100,00	100,00 ; 30,00 ; 100,00 ; 100,00	1.570.000.000	100,00 ; 40,00 ; 100,00 ; 100,00	1.601.500.000										
		1.1.2.8	Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit Paket	0	1	0	1	0										
		1.1.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT % ; %	95,50 ; 20,00	97,70 ; 20,00	3.280.000.000	97,70 ; 20,00	3.635.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.3.1		Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar;Jumlah workshop/ bimtek/ sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer Puskesmas ; kegiatan	22,00 ; 4,00	22,00 ; 9,00	400.000.000	22,00 ; 9,00	450.000.000									
		1.1.3.2		Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina Orang	200	200	75.000.000	230	80.000.000									
		1.1.3.3		Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi Puskesmas	6	8	600.000.000	8	850.000.000									
		1.1.3.4		Pengamanan Kesehatan (PAM)	Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental kegiatan	97	97	200.000.000	97	200.000.000									
		1.1.3.5		Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor Orang	109	109	800.000.000	109	800.000.000									
		1.1.3.6		Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina sarana	22	22	125.000.000	22	130.000.000									
		1.1.3.7		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Jumlah pemeriksaan di Labkesda Pemeriksaan	1200	1200	80.000.000	1350	125.000.000									
		1.1.3.8		Pelayanan Public Safety Center (PSC)	Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC Korban	0	396	1.000.000.000	396	1.000.000.000									
		1.1.3.9		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas difasilitasi pengajuan akreditasi Puskesmas	1	8	0	8	0									
		1.1.3.10		Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Jumlah Labkesda terakreditasi unit	0	1	0	0	0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Daerah															
		1.1.4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek;Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar;Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar;Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar;Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat % ; % ; % ; % ; %	100,00 ; 70,00 ; 90,00 ; 80,00 ; 82,50	100,00 ; 70,00 ; 90,00 ; 80,00 ; 82,50	25.352.353.000	100,00 ; 75,00 ; 100,00 ; 80,00 ; 82,50	10.216.956.000									
		1.1.4.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenis	2	2	0	2	0									
		1.1.4.2	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian %	100	100	125.000.000	100	0									
		1.1.4.3	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN;Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Jiwa ; Orang	48000,00 ; 600,00	48000,00 ; 600,00	8.150.000.000	0,00 ; 0,00	0									
		1.1.4.4	Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya UPTD	19	19	986.000.000	19	1.149.456.000									
		1.1.4.5	Pengadaan Alat Kesehatan dan	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Jenis	20	20	2.500.000.000	25	4.750.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga																
		1.1.4.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan Orang	654	654	880.000.000	654	880.000.000										
		1.1.4.7	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat;Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT;Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat;Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna) Ritel ; Ritel ; Apotek ; produk	390,00 ; 100,00 ; 79,00 ; 134,00	390,00 ; 90,00 ; 40,00 ; 134,00	240.000.000	390,00 ; 90,00 ; 40,00 ; 134,00	250.000.000										
		1.1.4.8	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS Orang	654	654	2.821.353.000	654	2.525.000.000										
		1.1.4.9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK Bulan	12	12	100.000.000	12	120.000.000										
		1.1.4.10	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan;Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan;Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN SK ; Orang ; SK	250,00 ; 1250,00 ; 180,00	250,00 ; 1315,00 ; 180,00	200.000.000	250,00 ; 1612,00 ; 185,00	250.000.000										
		1.1.4.11	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan kali	5	7	175.000.000	9	192.500.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.4.12		Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten Tenaga Kesehatan	9	9	75.000.000	9	100.000.000								
		1.1.4.13		Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN Jiwa	48000	48000	9.100.000.000	0	0								
		1.1.4.14		Pengelolaan Obat E-Logistik	Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E Logistik Bulan	12	12	0	12	0								
		1.1.5		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Pencapaian SPM RSUD %	80	80	63.090.000.000	81	77.000.000.000								
		1.1.5.1		Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan	Persentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan %	100	100	90.000.000	100	0								
		1.1.5.2		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD Bulan	12	12	63.000.000.000	12	77.000.000.000								
		1.1.5.3		Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Paket	4	0	0	10	0								
		1.1.5.4		Pembangunan/R ehabilitasi Gedung Rumah Sakit	Jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung Rumah Sakit unit	0	0	0	1	0								
		1.1.5.5		Pengadaan Ambulan/Mobil Jenazah	Jumlah pengadaan ambulance/mobil jenazah unit	1	0	0	0	0								
		1.1.5.6		Pengadaan IPAL	Jumlah pembangunan IPAL unit	0	0	0	1	0								
		1.1.5.7		Pembangunan IPAL	Jumlah alat pengolah limbah padat unit	1	0	0	0	0								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase perkembangan pembangunan Rumah Sakit Tipe D %	0	0	0	5	1.000.000.000									
		1.1.6.1	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun unit	0	0	0	1	1.000.000.000									
		1.1.6.2	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Pengadaan IPAL;Jumlah Pengadaan Incinerator unit ; unit	0,00 ; 0,00	0,00 ; 0,00	0	1,00 ; 1,00	0									
		1.1.6.3	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah pengadaan ambulance/ mobil jenazah unit	0	0	0	0	0									
		1.1.6.4	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Paket	0	0	0	0	0									
		1.1.6.5	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Paket	0	0	0	0	0									
		1.1.6.6	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Jumlah pengadaan Meubeler Rumah Sakit Paket	0	0	0	0	0									
		1.1.6.7	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit Paket	0	0	0	0	0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.6.8		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Paket	0	0	0	0	0								
		1.1.6.9		Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat Rumah Sakit Paket	0	0	0	0	0								
		1.1.7		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar;Persentase Pustu dalam kondisi baik;Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik % ; % ; %	66,00 ; 71,00 ; 75,00	67,30 ; 78,00 ; 82,00	4.965.000.000	73,20 ; 85,00 ; 91,00	7.800.000.000								
		1.1.7.1		Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu unit	0	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000								
		1.1.7.2		Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas unit	1	1	2.000.000.000	2	4.000.000.000								
		1.1.7.3		Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar %	100	100	365.000.000	100	0								
		1.1.7.4		Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling unit	7	4	1.600.000.000	4	1.600.000.000								
		1.1.7.5		Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Jumlah rehabilitasi/pembangunan sedang/berat puskesmas unit	2	4	0	3	0								

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		1.1.7.6		Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu unit	0	0	0	1	700.000.000										
		1.1.7.7		Pembangunan/R ehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis unit	0	0	0	2	500.000.000										
		1.1.9	Program Lama	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan %	100	100	7.200.000.000	100	7.300.000.000										
		1.1.9.1		Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Jumlah penduduk diberi iuran Premi JKN Jiwa	48000	48000	2.000.000.000	48000	500.000.000										
		1.1.9.2		Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP Jenis	11	11	1.600.000.000	11	1.500.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP																
		1.1.9.3	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP	Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP unit	0	8	3.500.000.000	2	600.000.000										
		1.1.9.4	Pelatihan tenaga kesehatan dan / atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan/ tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis Orang	0	12	100.000.000	20	200.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.9.5	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan/p enambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL	Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTL unit	0	0	0	1	3.000.000.000									
		1.1.9.6	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTL	Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTL Jenis	0	0	0	0	0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		1.1.9.7		Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenis	0	0	0	3	1.500.000.000									
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	2.1.1		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang didaftarkan peserta JKN oleh Pemerintah Daerah %	0	0	0	100	15.100.000.000									
		2.1.1.1		Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN; Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Jiwa ; Orang	0,00 ; 0,00	0,00 ; 0,00	0	48000,00 ; 400,00	6.000.000.000									
		2.1.1.2		kemitraan asuransi kesehatan	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN Jiwa	0	0	0	48000	9.100.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
				masyarakat (pajak rokok)														
		01.02.02	Program Baru	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	85%	56.650.266.848	85%	83.942.752.000	85%	73.477.510.000		
		01.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat, BMHP, Alkes, Sarana dan Prasaecana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	70%	27.741.087.070	70%	56.355.000.000	70%	46.240.000.000		
		01.02.02.2.02.01		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Saran dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun						1 unit	2.850.000.000	1 unit	38.500.000.000	1 unit	30.000.000.000		
		01.02.02.2.01.02		Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan/bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan FKTP	-	-	-	-	-	1 Unit	2.000.000.000	4 unit	2.000.000.000	4 unit	2.000.000.000		
		01.02.02.2.01.03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan/relokasi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ; Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu	-	-	-	-	-	1 unit ; 2 unit	3.258.051.000		-		-		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas						0		2 unit	4.000.000.000	2 unit	4.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		01.02.0 2.2.01.0 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan/bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan FTKL						1 unit	2.000.000.000	-	-	-	-				
		01.02.0 2.2.01.1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	-	-	-	-	-	2 unit	562.500.000	3 unit	750.000.000	3 unit	750.000.000				
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis						0		1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000				
		01.02.0 2.2.01.1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Bebas Jentik (Jumlah pengadaan mesin fogging) ; Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas ; jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling	-	-	-	-	-	95% ; 2 unit	1.654.399.800	95% ; 5 unit	2.855.000.000	95% ; 2 unit	1.190.000.000				
		01.02.0 2.2.01.1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan ; Jumlah pengadaan alat kesehatan (DAK) ; Jumlah pengadaan Alat Kesehatan di FKTP (DBHCHT) ; Jumlah pengadaan Alat Kesehatan RSUD	-	-	-	-	-	4 jenis ; 15 jenis ; 10 jenis	6.239.723.000	4 jenis ; 15 jenis ; 10 jenis	5.300.000.000	4 jenis ; 15 jenis ; 10 jenis	5.100.000.000				
		01.02.0 2.2.01.1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ; Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DBHCHT)	-	-	-	-	-	1 Jenis ; 1 Jenis	4.589.476.270	1 Jenis ; 1 Jenis	1.250.000.000	1 Jenis ; 1 Jenis	1.250.000.000				
		01.02.0 2.2.01.1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ; Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DBHCHT)	-	-	-	-	-	1 Jenis ; 1 Jenis	4.111.937.000	1 Jenis ; 1 Jenis	1.000.000.000	1 Jenis ; 1 Jenis	1.250.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 2.2.01.2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Kalibrasi alat kesehatan ; Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	1 Paket ; 12 Bulan	475.000.000	1 Paket ; 12 Bulan	400.000.000	1 Paket ; 12 Bulan	400.000.000			
		01.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	-	-	-	-	-	83%	27.495.079.778	83%	25.922.752.000	83%	25.517.510.000			
		01.02.0 2.2.02.0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart	-	-	-	-	-	100%	148.267.900	100%	203.000.000	100%	203.000.000			
		01.02.0 2.2.02.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart	-	-	-	-	-	100%	1.450.351.788	100%	305.000.000	100%	305.000.000			
		01.02.0 2.2.02.0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standart	-	-	-	-	-	100%	73.333.600	100%	112.000.000	100%	112.000.000			
		01.02.0 2.2.02.0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standart	-	-	-	-	-	100%	58.833.800	100%	80.000.000	100%	80.000.000			
		01.02.0 2.2.02.0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	-	-	-	-	100%	161.442.800	100%	375.000.000	100%	375.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		01.02.0 2.2.02.0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif ; Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu ;Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100% ; 100 %; 12 Bulan	183.348.150	100% ; 100 %; 12 Bulan	1.166.200.000	100% ; 100 %; 12 Bulan	1.189.650.000				
		01.02.0 2.2.02.0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut ; Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100% ; 12 Bulan	117.839.550	100% ; 12 Bulan	125.000.000	100% ; 12 Bulan	125.000.000				
		01.02.0 2.2.02.0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	-	-	-	-	-	100%	9.999.900	100%	83.300.000	100%	84.975.000				
		01.02.0 2.2.02.0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus sesuai standar	-	-	-	-	-	100%	11.999.800	100%	83.300.000	100%	84.975.000				
		01.02.0 2.2.02.1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat	Pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar ; Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100% ; 12 Bulan	49.440.700	100% ; 12 Bulan	166.600.000	100% ; 12 Bulan	169.950.000				
		01.02.0 2.2.02.1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	-	-	-	-	-	80%	173.128.400	80%	434.930.000	80%	431.250.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 2.2.02.1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan ; Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS ; Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standart	-	-	-	-	-	12 kelompok resti ; 3 WPA ; 90%	209.581.950	12 kelompok resti ; 3 WPA ; 91%	510.570.000	12 kelompok resti ; 3 WPA ; 92%	518.750.000			
		01.02.0 2.2.02.1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan ASI Eksklusif ; Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT ; Cakupan TTD remaja putri ; Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	-	-	-	-	-	82% ; 90% ; 64,20 % ; 90%	452.450.550	82% ; 90% ; 64,20 % ; 90%	1.100.000.000	82% ; 90% ; 64,20 % ; 90%	1.200.000.000			
		01.02.0 2.2.02.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan ;Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal ; Jumlah Pos UKK terbentuk ; Persentase Kelompok/Klub Olahraga ; Persentase Pengukuran Kebugaran anak sekolah ; Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji	-	-	-	-	-	12 Bulan ; 62 Pos UKK ; 5 pos ; 35% ; 32 % : 86%	167.845.000	12 Bulan ; 67 Pos UKK ; 5 pos ; 35% ; 34% : 88%	520.000.000	12 Bulan ; 72 Pos UKK ; 5 pos ; 35% ; 34% : 90%	530.000.000			
		01.02.0 2.2.02.1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan ; Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas ;Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen ; Persentase Rumah Sehat	-	-	-	-	-	12 Bulan; 90%; 80%; 76%	285.834.630	12 Bulan; 91%; 80%; 77%	550.000.000	12 Bulan; 92%; 80%; 77%	550.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 2.2.02.1 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina	-	-	-	-	200 orang	63.750.000	290 orang	90.000.000	320 orang	95.000.000			
		01.02.0 2.2.02.2 0		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan AFP per 100.000 penduduk 15 tahun ; Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap ; Cakupan BIAS ; Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 24 jam ; Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam ; Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan ; Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	3 kasus ; 94 % ; 97% ; 100% ; 100% ; 400 orang ; 12 Bulan	609.999.750	3 kasus ; 94,5 % ; 97% ; 100% ; 100% ; 420 orang ; 12 Bulan	605.000.000	3 kasus ; 95 % ; 98% ; 100% ; 100% ; 450 orang ; 12 Bulan	630.000.000			
		01.02.0 2.2.02.2 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase kasus Pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	100%	15.000.000	100%	116.620.000	100%	118.965.000			
		01.02.0 2.2.02.2 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan napza	Persentase kasus pasung yang mendapat pelayanan keshatan sesuai standar	-	-	-	-	100%	5.006.600	100%	49.980.000	100%	50.985.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 2.2.02.2 4		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah penanganan kesehatan rutin dan insidental	-	-	-	-	120 Kegiatan	262.500.000	97 Kegiatan	200.000.000	97 Kegiatan	200.000.000			
		01.02.0 2.2.02.2 5		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Bebas Jentik ; Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan ; Penemuan kasus pneumonia balita ; Persentase penemuan kasus diare Balita disarana kesehatan ; RFT Rate Kusta	-	-	-	-	95 % ; 12 Bulan ; 86 % ; 100% ; 95%	534.263.960	95 % ; 12 Bulan ; 87 % ; 100% ; 95%	945.500.000	95 % ; 12 Bulan ; 87 % ; 100% ; 95%	937.500.000			
		01.02.0 2.2.02.2 6		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas dan RS ; Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS	-	-	-	-	300 orang ; 654 Orang	18.382.528.750	300 orang ; 654 Orang	16.240.752.000	300 orang ; 654 Orang	15.855.510.000			
		01.02.0 2.2.02.2 9		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan ; Persentase tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan ; Veerifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten	-	-	-	-	12 Bulan ; 89 % ; 22 Desa	247.418.500	12 Bulan ; 89 % ; 22 Desa	510.000.000	12 Bulan ; 90 % ; 22 Desa	520.000.000			
		01.02.0 2.2.02.3 5		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi	-	-	-	-	14 Puskesmas	1.872.692.700	8 Puskesmas	850.000.000	6 Puskesmas	650.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 2.2.02.3 8		Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat (SPGDT)	Jumlah kasus kegawat daruratan ditangani PSC ; Jumlah Pengadaan alat PSC 119 ; Jumlah pengadaan ambulans PSC 119	-	-	-	-	396 Korban ; 1 Paket ; 1 unit	1.948.221.000	225 Korban ; 1 Paket ; 1 unit	500.000.000	250 Korban ; 1 Paket ; 1 unit	500.000.000			
		01.02.0 2.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase dokumen data dan informasi kesehatan terusun tepat waktu	-	-	-	-	100%	56.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000			
		01.02.0 2.2.03.0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun	-	-	-	-	3 Dokumen	56.000.000	3 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	125.000.000			
		01.02.0 2.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	97,70%	1.358.100.000	97,70 %	1.540.000.000	97,70 %	1.595.000.000			
		01.02.0 2.2.04.0 3		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standart ; Jumlah Perawat Ponkesdes dan dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas mendapat honor ; Jumlah Workshop/bimtek/sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan prime	-	-	-	-	22 puskesmas ; 109 orang ; 9 kegiatan	1.268.100.000	22 puskesmas ; 109 orang ; 9 kegiatan	1.400.000.000	22 puskesmas ; 109 orang ; 9 kegiatan	1.450.000.000			
		01.02.0 2.2.04.0 4		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibangun	-	-	-	-	12 sarana	90.000.000	12 sarana	140.000.000	12 sarana	145.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
				Pelayanan Kesehatan Rujukan															
		01.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	-	-	-	-	100%	721.000.000	100%	980.000.000	100%	1.145.000.000				
		01.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan	-	-	-	-	600 orang	75.000.000		295.000.000		310.000.000				
		01.02.03.2.01.01		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan berijin di Kabupaten Magetan ;	-	-	-	-	600 orang	50.000.000	650 orang	195.000.000	700 orang	210.000.000				
		01.02.03.2.01.02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan berijin di Kabupaten Magetan	-	-	-	-	600 orang	25.000.000	650 orang	100.000.000	700 orang	100.000.000				
		01.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk	Jumlah Puskesmas dan RSUD yang tenaga kesehatannya sesuai standar	-	-	-	-	25 unit	25.000.000		135.000.000		150.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																
		01.02.0 3.2.02.0 1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan berijin di Kabupaten Magetan	-	-	-	-	-	25 unit	25.000.000	25 unit	135.000.000	25 unit	150.000.000				
		01.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan ;	-	-	-	-	-	5 kali	621.000.000		550.000.000		685.000.000				
		01.02.0 3.2.03.0 1	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bintek kesehatan yang dilakukan ; Jumlah SK fungsional yang diterbitkan ; Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN ; Jumlah Tenaga Kesehatan/tenaga administrasi mengikuti pelatihan teknis (DBHCHT)	-	-	-	-	-	5 kali ; 175 SK ; 2 SK 10 Orang	621.000.000	5 kali ; 175 SK ; 2 SK 30 Orang	550.000.000	5 kali ; 175 SK ; 2 SK 40 Orang	685.000.000				
		01.02.0 4	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pembinaan dan pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat	-	-	-	-	-	85%	581.684.000	85%	250.000.000	85%	250.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 4.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek yang diperiksa memenuhi syarat	-	-	-	-	100%	13.750.000		45.000.000		45.000.000			
		01.02.0 4.2.01.0 1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik yang diperiksa memenuhi syarat ;Jumlah Produk Pangan yang bebas P3 (Pengawet,Pemanis,Pewarna)	-	-	-	-	40 apotik ;134 PIRT	13.750.000		45.000.000		45.000.000			
		01.02.0 4.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat	-	-	-	-	85%	451.837.000		75.000.000		75.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 4.2.03.0 1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Ritel Pangan yang diperiksa memenuhi syarat ; Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikasi PIRT					390 Ritel ; 90 UMKM	451.837.000	390 Ritel ; 90 UMKM	75.000.000	390 Ritel ; 90 UMKM	75.000.000			
		01.02.0 4.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase TPM memenuhi syarat					85%	116.097.000		130.000.000		130.000.000			
		01.02.0 4.2.06.0 1		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase TPM memenuhi syarat					80%	116.097.000	80%	130.000.000	80%	130.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah tangga Sehat	-	-	-	-	-	64%	1.054.722.000	64%	1.680.000.000	65%	1.700.000.000				
		01.02.05.2.01	Advokasi,pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga Sehat	-	-	-	-	-	100%	188.700.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000				
		01.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Pendataan keluarga sehat ; Cakupan tatanan sehat ; Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100% ; 63% ; ; 12 Bulan	188.700.000	100% ; 64% ; ; 12 Bulan	200.000.000	100% ; 65% ; ; 12 Bulan	200.000.000				
		01.02.05.2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	-	-	-	-	-	65%	445.425.000		800.000.000		800.000.000				
		01.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Pendataan keluarga sehat ;Cakupan PHBS ; Cakupan tatanan sehat ; Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	63% ; 63% ; 12 Bulan	445.425.000	64% ; 64% ; 12 Bulan	800.000.000	64% ; 64% ; 12 Bulan	800.000.000				
		01.02.05.2.03	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Cakupan Posyandu PURI	-	-	-	-	-	75%	420.597.000	75%	680.000.000	76%	700.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			Daerah Kabupaten/Kota																
		01.02.05.2.03.01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan UKBM yang dibina ;Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan ;Cakupan Desa Siaga Akt	-	-	-	-	-	91% ;12 bulan ;100%	420.597.000	91% ;12 bulan ;100%	680.000.000	91% ;12 bulan ;100%	700.000.000			
		1.1.8	Program Lama	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian SPM Kesehatan %	80	80	26.988.997.000	81	26.529.670.000									
		1.1.8.1		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	70	75	1.750.000.000	76	1.721.250.000									
		1.1.8.4		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	70	75	3.264.580.000	76	3.280.905.000									
		1.1.8.5		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	70	75	2.015.000.000	76	2.025.000.000									
		1.1.8.11		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) %	70	75	1.538.505.000	76	1.570.805.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		1.1.8.2		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	70	12	75.700.000	12	82.000.000									
		1.1.8.3		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	70	12	51.900.000	12	70.000.000									
		1.1.8.6		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	54.500.000	12	75.000.000									
		1.1.8.7		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	55.900.000	12	75.000.000									
		1.1.8.8		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	56.400.000	12	70.000.000									
		1.1.8.9		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	63.640.000	12	72.000.000									
		1.1.8.10		Penyediaan Biaya Operasional dan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	12	12	56.200.000	12	70.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			Pemeliharaan Puskesmas Poncol	dan jaringannya Bulan															
		1.1.8.12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	60.000.000	12	75.000.000										
		1.1.8.13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	64.400.000	12	75.000.000										
		1.1.8.14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	63.400.000	12	72.000.000										
		1.1.8.15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	54.500.000	12	73.000.000										
		1.1.8.16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	54.400.000	12	75.000.000										
		1.1.8.17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	59.100.000	12	70.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Lembeyan															
		1.1.8.18		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	87.200.000	12	88.000.000								
		1.1.8.19		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	58.100.000	12	70.000.000								
		1.1.8.20		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	71.100.000	12	75.000.000								
		1.1.8.21		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya Bulan	12	12	51.800.000	12	75.000.000								
		1.1.8.25		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	69.560.000	12	75.000.000								
		1.1.8.22		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.228.430.400	12	1.177.457.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		1.1.8.23	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	438.478.100	12	420.284.000										
		1.1.8.24	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.585.190.100	12	1.539.413.000										
		1.1.8.26	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	752.533.900	12	721.308.000										
		1.1.8.27	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	737.239.400	12	706.648.000										
		1.1.8.28	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.195.071.900	12	1.145.483.000										
		1.1.8.29	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	12	12	535.061.100	12	512.859.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			(Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Bulan															
		1.1.8.30	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Pongol	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	791.801.400	12	758.946.000										
		1.1.8.31	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.355.732.400	12	1.299.477.000										
		1.1.8.32	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.176.531.400	12	1.127.712.000										
		1.1.8.33	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	500.251.200	12	479.493.000										
		1.1.8.34	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.527.780.100	12	1.444.385.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		1.1.8.35	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.187.918.500	12	1.138.626.000										
		1.1.8.36	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	779.670.500	12	747.318.000										
		1.1.8.37	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	785.537.300	12	752.942.000										
		1.1.8.38	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.088.567.500	12	1.043.398.000										
		1.1.8.39	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	1.195.983.100	12	1.146.356.000										
		1.1.8.40	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bulan	12	12	451.333.700	12	432.605.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Puskesmas Rejomulyo															
		1.1.8.41	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.42	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.43	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.44	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.45	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.46	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembayan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.8.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.48	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.49	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.50	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.51	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.52	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.8.53	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.54	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.55	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.56	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.57	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.58	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									
		1.1.8.59	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		1.1.8.60		(BOK) Puskesmas Takeran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0								
		1.1.8.61		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0								
		1.1.8.62		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Bulan	12	12	0	12	0								
			Program Baru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Indek kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	83%	8.338.425.000	84%	8.855.154.000	85%	8.968.309.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan (BLUD)	-	-	-	-	-	77%	8.338.425.000	78%	8.855.154.000	80%	8.968.309.000		
				Puskesmas Kawedanan		-	-	-	-	-								
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan (BLUD)	-	-	-	-	-	77%	1.824.500.000	78%	2.045.000.000	80%	2.055.000.000		
				Puskesmas Ngariboyo		-	-	-	-	-								
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan (BLUD)	-	-	-	-	-	77%	1.600.000.000	78%	1.764.549.000	80%	1.764.549.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				Puskesmas Panekan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan (BLUD)	-	-	-	-	77%	3.264.580.000	78%	3.313.795.000	80%	3.330.360.000			
				Puskesmas Karangrejo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan (BLUD)	-	-	-	-	77%	1.649.345.000	78%	1.731.810.000	80%	1.818.400.000			
				Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	85%	22.181.253.069	85%	19.155.680.417	85%	19.366.627.894			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	-	-	-	-	83%	22.181.253.069	83%	19.155.680.417	83%	19.366.627.894			
				Puskesmas Sidokerto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	940.400.000	12 bulan	803.359.533	12 bulan	807.749.729			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	179.999.800	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
				Puskesmas Plaosan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	1.440.485.000	12 bulan	1.394.602.454	12 bulan	1.402.853.275			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	189.999.470	12 bulan	92.000.000	12 bulan	95.000.000			
				Puskesmas Sumberagung		-	-	-	-									
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	589.810.000	12 bulan	509.318.403	12 bulan	512.288.606			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	184.992.550	12 bulan	88.000.000	12 bulan	92.500.000			
				Puskesmas Poncol		-	-	-	-									
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	1.117.953.941	12 bulan	860.031.841	12 bulan	864.799.607			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
				Puskesmas Parang		-	-	-	-									
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	2.003.777.953	12 bulan	1.728.709.019	12 bulan	1.738.122.637			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	189.999.748	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				Puskesmas Tladan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	812.748.752	12 bulan	764.480.302	12 bulan	768.555.778			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	185.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
				Puskesmas Lembeyan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	1.410.899.912	12 bulan	1.267.904.596	12 bulan	1.274.834.216			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	175.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
				Puskesmas Takeran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	1.208.210.000	12 bulan	1.432.823.645	12 bulan	1.440.587.815			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	179.999.740	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
				Puskesmas Gorang-gareng taji		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	770.924.943	12 bulan	593.378.499	12 bulan	596.722.274			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
			Puskesmas Bendo		-	-	-	-	-									
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	1.592.995.456	12 bulan	1.557.904.625	12 bulan	1.586.288.008			
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	-	12 bulan	190.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
			Puskesmas Maospati		-	-	-	-	-									
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	1.250.224.023	12 bulan	1.274.113.211	12 bulan	1.281.071.658			
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	-	12 bulan	179.999.970	12 bulan	92.000.000	12 bulan	95.000.000			
			Puskesmas Ngujung		-	-	-	-	-									
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	548.824.394	12 bulan	525.562.886	12 bulan	528.397.510			
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000			
			Puskesmas Tebon		-	-	-	-	-									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	807.460.000	12 bulan	784.359.301	12 bulan	788.401.001				
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000				
				Puskesmas Kartoharjo		-	-	-	-										
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	973.500.000	12 bulan	832.925.188	12 bulan	837.480.329				
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000				
				Puskesmas Taji		-	-	-	-										
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	1.490.000.000	12 bulan	1.311.952.792	12 bulan	1.319.283.819				
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	185.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000				
				Puskesmas Sukomoro		-	-	-	-										
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	1.166.400.000	12 bulan	1.124.427.367	12 bulan	1.130.402.051				
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
				Puskesmas Rejomulyo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Jaminan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	461.675.000	12 bulan	475.919.884	12 bulan	478.493.660			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ketersediaan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	-	-	-	-	12 bulan	180.000.000	12 bulan	88.000.000	12 bulan	92.500.000			
				LABKESDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan ;Jumlah pemeriksaan di Labkesda ; Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya	-	-	-	-	12 Bulan ; 1500 Pemeriksaan : 1 UPTD	288.699.717	12 Bulan ; 1500 Pemeriksaan : 1 UPTD	303.906.871	12 Bulan ; 1500 Pemeriksaan : 1 UPTD	325.295.921			
				IFK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK ; Jumlah Pelaksanaan pengelolaan Obat E-Logistik	-	-	-	-	12 Bulan; 12 Bulan	206.272.700	12 Bulan; 12 Bulan	140.000.000	12 Bulan; 12 Bulan	140.000.000			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.02.05	Program Baru	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Sehat	-	-	-	-	65%	10.245.631.900							
		01.02.05.02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Cakupan PHBS	-	-	-	-	65%	10.245.631.900							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Kabupaten/Kota															
			Puskesmas Candirejo		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	885.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Sidokerto		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	555.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Plaosan		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	434.999.950	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Sumberagung		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	434.999.950	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Poncol		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	565.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Bersih dan Sehat															
			Puskesmas Parang		-	-	-	-	-	-								
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	715.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Tladan		-	-	-	-	-	-								
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	430.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Lembeyan		-	-	-	-	-	-								
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	685.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Takeran		-	-	-	-	-	-								
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	695.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Gorang-gareng taji		-	-	-	-	-	-								
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	465.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Bersih dan Sehat															
			Puskesmas Bendo		-	-	-	-	-	-								
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	790.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Maospati		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	490.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Ngujung		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	425.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Tebon		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	445.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			
			Puskesmas Kartoharjo		-	-	-	-	-									
			Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	555.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
				Puskesmas Taji		-	-	-	-	-									
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	565.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-				
				Puskesmas Sukomoro		-	-	-	-	-									
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	640.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-				
				Puskesmas Rejomulyo		-	-	-	-	-									
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	12 bulan	470.632.000	12 bulan	-	12 bulan	-				
		01.02.02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indek kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	85%	97.674.999.975	85%	80.000.000.000	85%	82.000.000.000				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	-	-	-	-	83%	97.674.999.975								
				Puskesmas Kawedanan		-	-	-	-	-									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Ngariboyo	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	524.999.975	12 bulan	-	12 bulan	-				
			Operasional Pelayanan Puskesmas Panekan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	645.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-				
			Operasional Pelayanan Puskesmas Karangrejo	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	925.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-				
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	12 bulan	580.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-				
			operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD	-	-	-	-	-	12 bulan	95.000.000.000	12 bulan	80.000.000.000	12 bulan	82.000.000.000				
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1.1.1	Program Lama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	75	75	1.080.000.000	76	1.400.000.000									
		1.1.1.1		Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas Bulan	12	12	200.000.000	12	300.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18			
		1.1.1.2		Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	12	800.000.000	12	1.000.000.000										
		1.1.1.3		Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM Perangkat Daerah kali	1	1	80.000.000	1	100.000.000										
		2.1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	70	70	530.000.000	72	800.000.000										
		2.1.2.1		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Jenis	15	5	50.000.000	5	60.000.000										
		2.1.2.2		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor unit	2	45	200.000.000	30	430.000.000										
		2.1.2.3		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kali	3	102	220.000.000	108	230.000.000										
		2.1.2.4		Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan	2	2	60.000.000	2	80.000.000										
		3.1.3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %	21	28	175.000.000	35	185.000.000										
		3.1.3.1		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat Orang	6	6	75.000.000	6	75.000.000										
		3.1.3.2		Bimbingan teknis pengelolaan keuangan	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan Orang	0	46	100.000.000	50	110.000.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		4.1.4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	235.000.000	100	245.000.000										
		4.1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu Dokumen	7	10	135.000.000	10	135.000.000										
		4.1.4.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun Dokumen	3	3	100.000.000	3	110.000.000										
		01.02.01	Program Baru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	100%	88.450.105.576	100%	2.665.000.000	100%	2.750.000.000				
		01.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun tepat waktu	-	-	-	-	100%	146.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000				
		01.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu	-	-	-	-	4 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	105.000.000	5 Dokumen	105.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		01.02.0 1.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu : Jumlah pelaksanaan survey IKM Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5 Dokumen ; 1 Kali	76.000.000	5 Dokumen ; 1 Kali	130.000.000	5 Dokumen ; 1 Kali	130.000.000				
		01.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan	-	-	-	-	-	100%	86.161.887.226	100%	13.867.092	100%	14.444.888				
		01.02.0 1.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Pegawai	-	-	-	-	-	12 Bulan	86.150.275.726	12 Bulan		12 Bulan					
		01.02.0 1.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu	-	-	-	-	-	5 Dokumen	11.611.500	5 Dokumen	13.867.092	5 Dokumen	14.444.888				
		01.02.0 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100%	2.199.000	100%	2.626.167	100%	2.735.590				
		01.02.0 1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	12 Bulan	2.199.000	12 Bulan	2.626.167	12 Bulan	2.735.590				
		01.02.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100%	286.759.170	100%	8.585.704	100%	8.943.442				
		01.02.0 1.2.04.0 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	12 bulan	286.759.170	12 bulan	8.585.704	12 bulan	8.943.442				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		01.02.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	100%	24.498.000	100%	205.000.000	100%	215.000.000			
		01.02.0 1.2.05.1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	-	-	-	-	6 orang	24.498.000	50 orang	205.000.000	50 orang	215.000.000			
		01.02.0 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	100%	575.110.030	100%	912.406.161	100%	935.423.084			
		01.02.0 1.2.06.0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	12 Bulan	7.610.470	12 Bulan	9.088.490	12 Bulan	9.467.177			
		01.02.0 1.2.06.0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	12 Bulan	213.518.910	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	260.000.000			
		01.02.0 1.2.06.0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	12 Bulan	20.435.800	12 Bulan	24.405.557	12 Bulan	25.422.455			
		01.02.0 1.2.06.0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	12 Bulan	98.345.500	12 Bulan	117.449.609	12 Bulan	122.343.343			
		01.02.0 1.2.06.0 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	12 Bulan	125.599.350	12 Bulan	149.997.657	12 Bulan	156.247.559			
		01.02.0 1.2.06.0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	12 Bulan	9.600.000	12 Bulan	11.464.848	12 Bulan	11.942.550			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Perundang-undangan															
		01.02.0 1.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000			
		01.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100%	722.220.000	100%	862.514.876	100%	898.452.996			
		01.02.0 1.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	12 Bulan	95.700.000	12 Bulan	114.290.207	12 Bulan	119.052.299			
		01.02.0 1.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	5 Jenis	48.800.000	5 Jenis	58.279.646	5 Jenis	60.707.965			
		01.02.0 1.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	12 Bulan	577.720.000	12 Bulan	689.945.023	12 Bulan	718.692.732			
		01.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	100%	531.432.150	100%	425.000.000	1	440.000.000			
		01.02.0 1.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	12 kali	75.665.600	12 kali	70.000.000	12 kali	72.800.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
			Jabatan															
		01.02.0 1.2.09.0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	68 kali	191.418.000	68 kali	180.000.000	68 kali	187.200.000			
		01.02.0 1.2.09.0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	2 kegiatan	89.400.000	2 kegiatan	143.500.000	2 kegiatan	147.600.000			
		01.02.0 1.2.09.1 0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	-	-	-	-	1 Jenis	20.287.800	1 Jenis	31.500.000	1 Jenis	32.400.000			
		01.02.0 1.2.09.0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya (Instalasi Farmasi)	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor					1 kegiatan	154.660.750							
Total						143.948.35 0.000		163.271.12 6.000			287.511.121.026		198.907.001.000		191.057.405.000			

BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Dalam Perubahan RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab. Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Misi 1 :
Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)
2. Tujuan T1 :
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Sasaran S 1.1 T1 :
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Indikator sasaran :
Indeks Kesehatan
Strategi 1 :
Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas
Kebijakan :
 - a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi

Strategi 2 :

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ikut membantu mendukung pencapaian sasaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 dari sasaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

Sasaran S 1.3 T1 :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Indikator Sasaran : Angka Kemiskinan

Strategi :

Menyelenggarakan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi maskin dan PMKS lainnya

Arah Kebijakan urusan bidang kesehatan :

Memberikan jaminan kesehatan serta meningkatkan kepesertaan asuransi kesehatan dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage*

Indikator Kinerja :

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Pelayanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
1.	Angka Usia Harapan Hidup	72,16 (2017)	72,18	72,20	72,22	72,24	72,26	72,26
2.	Presentase Balita Gizi Buruk	0,99%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	5,8%	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
4	Prevalensi Balita Stunting	30,2%	<30%	<29,5 %	<29%	<28,5 %	<28%	<28%
5	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	98,16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	101,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	96,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	99,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	77,79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	88,53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
13.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	52,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	73,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
17.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV	95,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)	10,09	< 23	< 23	< 23	< 23	< 23	< 23
19.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)	11,07	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
20.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup (SDGs)	7,9	< 12	< 12	< 12	< 12	< 12	< 12
21.	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup (SDGs)	158,07	< 102	< 102	< 102	< 102	< 102	< 102
22.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	82,13%	90 %	90,5%	91 %	91,5%	92%	92%
23.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	95,34%	93 %	93,5%	94 %	94,5%	95%	95%
24.	Non Folio AFP rate per 100.000 penduduk	3,26	3	3	3	3	3	3
25.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	122,9	115	114	113	112	111	111

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26.	Prevalensi HIV/Aids (persen) dari total populasi	0,008	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
27.	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)	65,78%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
28.	Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (SDGs)	67%	66%	64%	60%	58%	55%	55%
Indikator kinerja RSUD								
1	BOR	75%	75%	78%	80%	83%	85%	85
2	ALOS	3 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari
3	TOI	2 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4	BTO	62 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
5	NDR	15‰	≤20‰	≤18‰	≤16‰	≤14‰	≤12‰	≤12‰
6	GDR	29‰	≤34‰	≤33‰	≤32‰	≤30‰	≤28‰	≤28‰
7	Infeksi Nosokomial	3,7‰	≤5‰	≤4,5‰	≤4‰	≤3,5‰	≤3‰	≤3‰

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan	1. Persentase Keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang melaksanakan lebih dari 80\% dari 12 indikator keluarga sehat}}{\text{Jumlah seluruh indikator keluarga sehat}} \times 100\%$
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 6. 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Keluarga Sehat	0,21%	0,21%	0,22%	0,225%	0,23%	0,25%	0,25%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	75 indeks	77 indeks	77 indeks	77 indeks	77 indeks	77 indeks	77 indeks

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD maka Dinas Kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dengan penyediaan sarana, prasarana kesehatan dan alat kesehatan, obat-obatan serta tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan pencapaian target indikator

bidang kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
rujukan di RSUD dr. Sayidiman.

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sebagai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ditetapkan Renstra Dinas Kesehatan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2023.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini maka diharapkan semua pihak dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana

kegiatan tahunan dalam upaya pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun (2018-2023).

3. Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan secara akumulatif dalam kurun waktu lima tahunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2023.
4. Seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, April 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN

dr. HARI WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 200212 1 002